

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI PAPUA DARI
PENYERANGAN OPM DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



OLEH:

MOHAMMAD IMAM MUBAROK
18071010193

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI PAPUA DARI
PENYERANGAN OPM DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



OLEH:

MOHAMMAD IMAM MUBAROK

18071010193

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI PAPUA DARI
PENYERANGAN OPM DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

Disusun Oleh :

MOHAMMAD IMAM MUBAROK

18074010193

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi pada tanggal 30 Agustus 2022

PEMBIMBING

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.

NIP 19601212 198803 1001

Menyetujui,

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.

NIP 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI PAPUA DARI
PENYERANGAN OPM DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

Disusun Oleh :

MOHAMMAD IMAM MUBAROK

18071010193

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal

9 September 2022

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP 19601212 198803 1001

1. **Yana Indrawati, S.H., M.H.**
NIP 19790126 202121 2 004

2. **Adhitya widya Kartika, S.H., M.H.**
NIP 1900112 202012 2003

3. **Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**
NIP 19601212 198803 1001

DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI PAPUA DARI
PENYERANGAN OPM DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

Disusun Oleh :

MOHAMMAD IMAM MUBAROK

18071010180

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP.19601212 198803 1001

1. **Yana Indawati, S.H., M.H.**
NIP.19700126 202121 2 004

2. **Adhitya widya Kartika, S.H., M.H.**
NIP 1960112 202012 2003

3. **Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.**
NIP.19601212 198803 1001

DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP.19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD IMAM MUBAROK

Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 14 Oktober 2000

NPM : 18071010193

Konsentrasi : Pidana

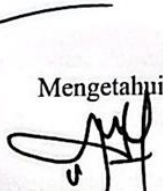
Alamat : Perumahan Bumi Suko Indah B2 Nomer 11.



Menyatakan dengan sesungguhnya bawa penelitian skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI PAPUA DARI PENYERANGAN OPM DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA”** dalam rangka guna memenuhi suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yaitu benar-benar suatu hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan bukan merupakan suatu hasil jiplakan atau plagiat.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan suatu hasil jiplakan atau plagiat maka saya bersedia dituntut didepan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan memiliki rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 30 Agustus 2022

Mengetahui

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP 19601212 198803 1001



Mohammad Imam Mubarak
180710101193

v

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi ini, dengan mengambil Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI PAPUA DARI PENYERANGAN OPM DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA”**.

Penulis skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori yang diterima dengan prakteknya di lapangan, sangat diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulisan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Ibu Mas Anienda Tien F S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Ec. Nuryanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Anajeng Esri Endhi Mahanani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi SH., MH.,selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
8. Kepada keluarga saya khususnya orang tua saya dan teman-teman saya khususnya Haliza,Kenza,Rohmawati,Ramdhan,Radya,Cois yang telah memberikan dukungan moril serta doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya sehingga skripsi ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kajian Pustaka	7
1.5.1.Pengertian Hak Asasi Manusia.....	7
1.5.2.Hak Asasi Manusia Indonesia	12
1.5.3.Pengadilan Hak Asasi Manusia	14
1.5.4.Kajian Umum Separatisme	16
1.5.5.Definisi Tenaga Kesehatan	17
1.5.6.Perlindungan Hukum.....	19
1.6. Metode Penelitian	22

1.6.1. Jenis Penelitian	22
1.6.2. Sumber Data	23
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	25
1.6.4. Metode Analisis Data	25
1.6.5. Sistematika Penulisan	26
BAB II Kejahatan OPM Yang Melakukan Penyerangan Terhadap Tenaga Kesehatan Termasuk Kejahatan HAM Menurut Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	29
2.1. Tindakan OPM Masuk Dalam Kategori Pelanggaran HAM ...	29
2.2. Pelanggaran Ham Apa Saja Yang Dilakukan OPM Terhadap Tenaga Kesehatan	40
BAB III ASURANSI TERHADAP OBJEK GADAI DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NASABAH GADAI	46
3.1. Upaya Hukum Atas Lepasnya Jaminan Gadai Kepada Pihak Selain Pemberi Gadai	46
3.2. Pemberian Asuransi Terhadap Jaminan Gadai Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Pemberi Gadai	54
BAB IV PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	64
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Penugasan Pembimbing
Lampiran 2	: Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 3	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
Lampiran 4	: Turnitin
Lampiran 5	: Transkrip
Lampiran 6	: Formulir Pengajuan Skripsi
Lampiran 7	: Lembar Revisi Dosen Penguji 1
Lampiran 8	: Lembar Revisi Dosen Penguji 2
Lampiran 9	: Lembar Revisi Dosen Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : MOHAMMAD IMAM MUBAROK
NPM : 18071010193
Konsentrasi : Pidana

**“PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DI PAPUA DARI
PENYERANGAN OPM DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 26
TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA”**

ABSTRACT

ABSTRACT

Indonesia is a country that has many tribes, languages and cultures spread from Sabang to Merauke, with a population that reaches 273.5 million; in need of a rule of law which aims to regulate and protect every community in Indonesia, especially in the field of human rights. This study uses a type of normative juridical research; the intention of normatively that this research examine laws and regulations, theories, or opinions of legal experts related to the writing material to be discussed; this study aims to determine the actions of the government in law enforcement in Indonesia. in the field of human rights and related to legal protection for medical personnel who are victims of OPM attacks which are linked to Law No. 26 of 2000 concerning human rights courts and regulations relating to legal protection and enforcement of human rights. The case that occurred in Papua is a case that falls into the category of serious human rights violations because, in this case, the OPM, which is a separatist group, has a mission to liberate Papua from Indonesia and become its own country. One method is used by means of terror against people who are not pro to the open; the method usually used by the OPM is to shoot the victim, which results in human rights violations. The results of this study are that the cases that occurred in the OPM attack on health workers are still many regulations that have not been maximized, which causes human rights violations which result in the fulfilment of human rights for the Papuan people being also disrupted. The Indonesian government, in the enforcement of human rights, can maximize the institutions engaged in the field of

human rights to make special plans or programs about understanding human rights and the importance of human rights so that people understand and respect each other more so that enforcement can be maximized.

Keywords: legal protection; law enforcement; health personnel; opm

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, bahasa dan budaya yang tersebar dari sabang sampai marauke, dengan jumlah penduduk yang mencapai 273,5 juta, di perlukan sebuah aturan hukum yang dimana bertujuan untuk mengatur dan melindungi setiap masyarakat yang ada di negara Indonesia terutama dibidang ham. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif, maksud dari secara normatif bahwa penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum di bidang ham dan terkait perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menjadi korban penyerangan opm yang dikaitkan dengan undang-undang no 26 tahun 2000 tentang peradilan ham dan perturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan penegakan ham. kasus yang terjadi dipapua merupakan kasus yang masuk dalam kategori pelanggaran ham berat karena dalam kasus ini opm yang merupakan kelompok separatism memiliki misi untuk memerdekakan papua agar lepas dari indonesia dan menjadi negara sendiri, opm melakukan berbagai cara dalam melancarkan misinya termasuk dengan cara yang sadis, salah satu cara yang digunakan dengan cara teror kepada masyarakat yang tidak pro terhadap opm, cara yang biasa dilakukan opm dengan menembak korban yang mengakibatkan munculnya pelanggaran ham. hasil dari penelitian ini adalah bahwa kasus yang terjadi dalam penyerangan opm terhadap tenaga kesehatan masih banyak penerapan peraturan yang belum maksimal yang menyebabkan terjadi pelanggaran ham yang berakibat pemenuhan ham untuk masyarakat papua juga terganggu. Pemerintah Indonesia dalam penegakan HAM bisa memaksimalkan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang HAM untuk membuat rencana atau program khusus tentang pemahaman HAM dan pentingnya HAM agar masyarakat lebih paham dan saling menghormati sehingga penegakkannya bisa lebih maksimal.

Kata Kunci : perlindungan hukum;penegakan ham; tenaga kesehatan; opm